

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
DALAM RENOVASI KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN
SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penjualan Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan dalam renovasi;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-323/MK.6/2015 tanggal 3 November 2015 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa telah dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan dalam renovasi melalui penjualan secara lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 039/2016 tanggal 2 Maret 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

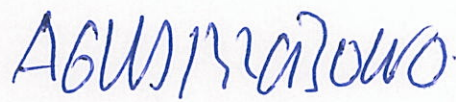
KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp6.764.087.861 (enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan nilai limit senilai Rp87.392.000 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- KETIGA : Penjualan Barang Milik Negara Berupa Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada tanggal 2 Maret 2016 di Lantai 9 Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B dengan harga jual Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
 PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN
 BANGUNAN DALAM RENOVASI KARENA
 PEMINDAHTANGAN MELALUI PENJUALAN SECARA
 LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 115 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 Mei 2016

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN BERUPA GEDUNG DAN
 BANGUNAN DALAM RENOVASI KARENA PEMINDAHTANGAN MELALUI
 PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

Kode Barang	NUJP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Limit (Rupiah)	Keterangan
6.07.03.01.001	283	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	2012	6,764,087,861	87,392,000	Interior Lantai 7 & 8, Rak Buku <i>Build In</i> , Rak Buku <i>Build In</i> Lantai 17, <i>Kitchen Set</i> Lantai 17, Rak Buku <i>Build In</i> Lantai 8, Kunci Laci Rak Buku, Kabel Data dan Telepon Lantai 7 & 8, Interior Ruang Server Lantai 17, Partisi, Pintu, <i>Raise Floor</i> Ruang Server Lantai 17, <i>Kitchen Set</i> Lantai 9, Interior <i>Build In</i> Lantai 9, Interior dan Partisi Lantai 9, Partisi Sekat Ruang 901, Interior ME Lantai 17, <i>Air Flow AC</i> Lantai 7 & 8, Konsultan Interior Lantai 17, Konsultan Pengawas Interior Lantai 17, Perapihan Ruang Server Lantai 17, Konsultan Interior dan Furniture Lantai 9, Interior dan ME Lantai 9, Konsultan Pengawas Interior dan ME Lantai 9, Instalasi AC Line Ruang Ujian
Total				6,764,087,861	87,392,000	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah Selaku
 Pengguna Barang

Agus Prabowo

Agus Prabowo